



RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang menyusun Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

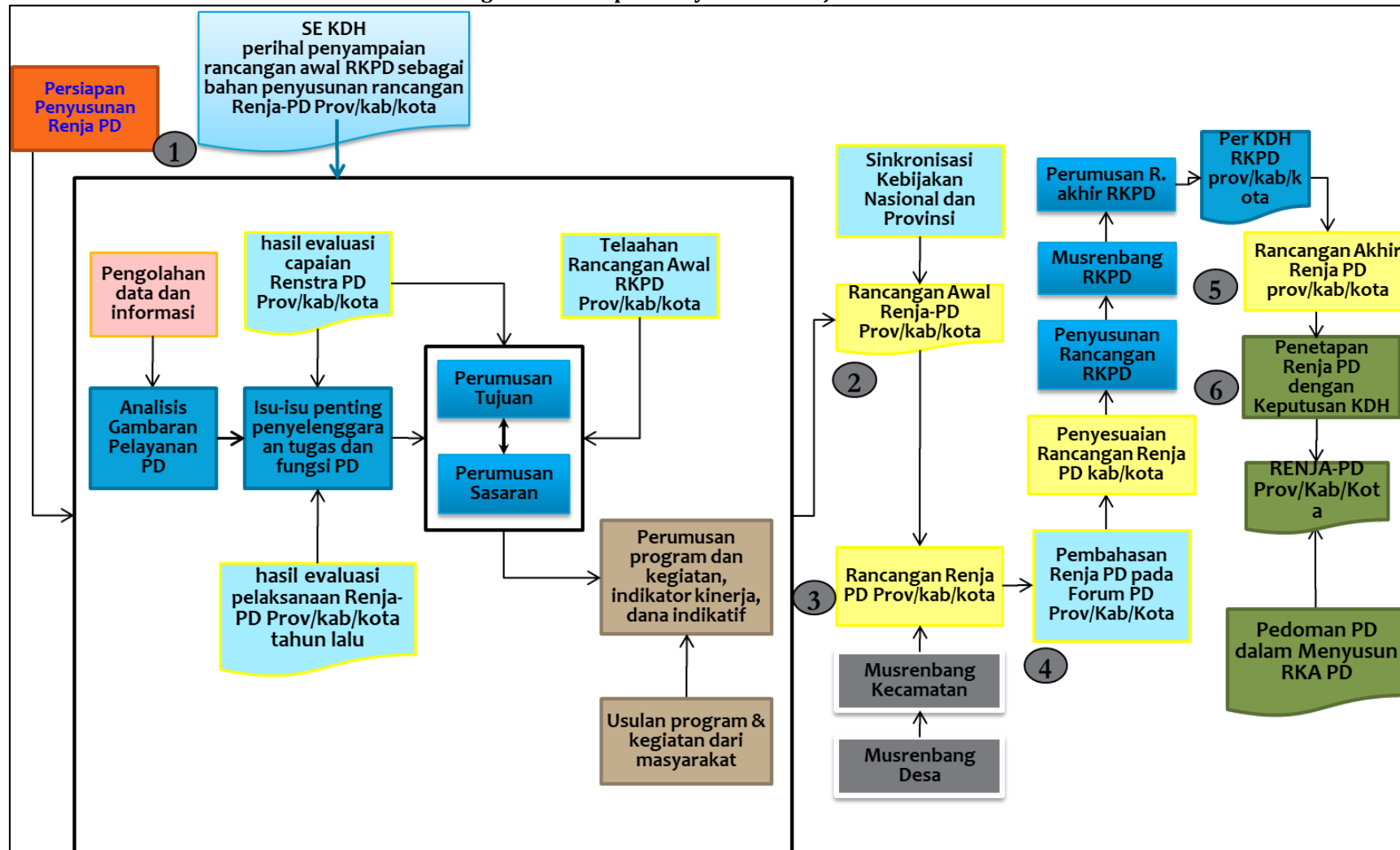
- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Bappelitbangda
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2022.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yaitu **“Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat melalui penguatan kontribusi sektor unggulan, kesehatan, dan infrastruktur menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien, Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Meningkatkan peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif”**.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan

Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024;
26. Peraturan Bupati Sampang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
27. Peraturan Bupati Sampang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;

2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2021, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.5 Faktor-faktor Kunci Keberhasilan
- 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Kegiatannya.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2019 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisis pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang pada tahun 2019.
- b. Evaluasi Renstra Sekretariat Daerah sampai dengan Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024 memuat 7 program dan 20 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renja Tahun 2019 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sampai dengan tahun 2020. Adapun Rekapitulasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana terlampir pada tabel T-C.29 di bawah ini

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2020

Kode Rekening	Urusan/Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4*100
4.05.	URUSAN PEMERINTAHAN										
4.05.4.05.03.16.	Program Fasilitas Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1	Persentase fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100		100	100	100	100	100	100
4.05.4.05.03.16.01.	Fasilitas Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	1	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim Otoda	120 rakor		24 rakor	36 rakor		24 rakor	60 rakor	50
		2	Jumlah dokumen kesepakatan bersama dan dokumen perjanjian kerjasama	120 naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama		24 naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama	36 naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama		12 naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama	48 naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama	40
4.05.4.05.03.16.02.	Fasilitas Percepatan Pembakuan Rupa Bumi dan Batas Wilayah	1	Jumlah dokumen rupabumi/toponimi	5dokumen dan 5 peta -		1 dokumen dan 1 peta -	1 dokumen dan 1 peta -		-	1 dokumen dan 1 peta	20
		2	Jumlah tapal batas wilayah yang di administrasikan	350 patok batas desa		70 patok batas desa	70 patok batas desa		53 patok batas desa	123 patok batas desa	35
4.05.4.05.03.16.03.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1	Jumah dokumen penyusunan LPPD dan ILPPD yang disusun	10 dokumen		2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	4 dokumen	40
4.05.4.05.03.16.04.	Fasilitas Layanan Pemerintahan	1	Jumlah dialog/audiensi yang dilaksanakan	70 kali		14 kali	12 kali		-	12 kali	17

		2	Jumlah kunjungan kerja pejabat negara yang dilaksanakan	60 kunjungan		12 kunjungan	16 kunjungan		-	16 kunjungan	27
		3	Jumlah rakor yang dilaksanakan	100 rakor		20 rakor	12 rakor		20 rakor	32 rakor	32
		4	Jumlah rakor unsur FORKOPIMDA yang dilaksanakan	120 kali		24 kali	14 kali		24 kali	38 kali	32
4.05.4.05.03.1 6.05.	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Daerah	1	Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan administrasi terpadu satu pintu	70 kecamatan		14 kecamatan	14 kecamatan		-	14 kecamatan	20
		2	Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan administrasi	70 kecamatan		14 kecamatan	14 kecamatan		14 kecamatan	28 kecamatan	40
4.05.4.05.03.17	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1	Persentase Produk Hukum yang diundangkan	100 %		100 %	100 %		100 %		
		2	Persentase Penyelesaian Kasus Hukum Perdata Pemerintah Daerah yang ditangani	100 %		100 %	100 %		100 %		
4.05.4.05.03.1 7.01.	Penyusunan Produk Hukum	1	Jumlah Perda yang diundangkan	58 Perda		10 Perda	10 Perda		10 Perda	22 Perda	40
		2	Jumlah Perbup yang diundangkan	250 Perbup		50 Perbup	76 Perbup		50 Perbup	164 Perbup	40
		3	Jumlah Raperda	25 Raperda		5 Raperda	5 Raperda		2 Raperda	7 Raperda	40
		4	Jumlah Naskah Akademik	25 Naskah Akademik		5 Naskah Akademik	5 Naskah Akademik		2 Naskah Akademik	7 Naskah Akademik	40
4.05.4.05.03.1 7.02.	Fasilitasi Bantuan Hukum	1	Jumlah Kasus Hukum yang ditangani	20 Kasus		4 Kasus	4 Kasus		4 Kasus	8 Kasus	
		2	Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum	1750 Org		350 Org	350 Org		0 Org	350 Org	
		3	Jumlah Kadarkum yang dibina	1125 Org		225 Org	225 Org		0 Org	225 Org	

4.05.4.05.03.1 7.03.	Fasilitasi dokumentasi dan keputusan Bupati	1	Jumlah Produk Hukum yang dipublikasikan berupa Buku Buletin edisi Juni dan Desember dan Lembaran Daerah tahun berjalan	1800 Buku		360 Buku	360 Buku		360 Buku	720 Buku	
		2	Jumlah Peserta Sosialisasi	1750 org		350 org	350 org		0 org	350 org	
		3	Jumlah Keputusan Bupati yang ditetapkan	2500 Kebup		500 Kebup	498 Kebup		500 Kebup	998 Kebup	
4.05.4.05.03.18.	Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Persentase target kinerja kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan formasi jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan	100		100	100	100	100	100	100
4.01.4.01.03.1 8.01.	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1	Jumlah Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	201 Laporan		42	42	100	42	84	41
		2	Jumlah Pelaporan Kinerja Kabupaten Sampang yang berkualitas dan tepat waktu	5 laporan		1	1	100	1	2	40
4.05.4.05.03.1 8.02.	Penyusunan Analisa Jabatan	1	Persentase Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan sesuai kebutuhan	100		100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Evaluasi Jabatan yang sesuai Permenpan	100		100	100	100	100	100	100
		3	Persentase Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan PNS sesuai standar yang dibutuhkan SO dan Tupoksi PD	100		100	100	100	-	-	50
4.05.4.05.03.1 8.03.	Peningkatan Ketatalaksanaan Pemerintah	1	Jumlah Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas, Kode Wilayah dan Pakaian Dinas	3 perbup		3	3	100	-	-	50
4.05.4.05.03.1 9.04.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	1	Jumlah Peraturan Bupati tentang RMRB Kabupaten Sampang	1 perbup		1 perbup	1 perbup	100	-	-	100
		2	Persentase PD yang telah menyusun Rencana Aksi (Action Plan) Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	100		100	100	100			

		3	Persentase PD yang telah dievaluasi Reformasi Birokrasi	100		100	100	100			
		4	Persentase PD yang telah menerapkan budaya kinerja	40		40	40	100	-	-	100
4.05.4.05.03.41.	Program Peningkatan Pelayanan Publik	1	Persentase dokumen IKM Kabupaten Sampang yang disusun	100,00		100	100	100	100,00	100	100,00
4.05.4.05.03.4.1.01.	Program Peningkatan Pelayanan Publik	1	Persentase Laporan Standar Pelayanan Publik yang benar dan tepat waktu	100,00		100	100	100	100,00	100	100,00
		2	Persentase Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang terukur	100,00		100	100	100	100,00	100	100,00
		3	Jumlah PD yang di Monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik	320 unit kerja		64 unit kerja	64 unit kerja	100	64 unit kerja	-	20
4.05.4.05.03.19.	Program Fasilitasi Administrasi Pembangunan Daerah	1	Persentase fasilitasi Kegiatan Administrasi Pembangunan Daerah	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00
4.05.4.05.03.1.9.01.	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	Jumlah Dokumen Pedoman dan Dokumen SSHB yang disusun	5 dok		1 dok	1 dok	100	2 dok	2 dok	40
		2	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	50 kali		10 kali	10 kali	100			20
		3	Jumlah dokumen HSPK yang disusun	5 dok		1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	40
4.05.4.05.03.1.9.02.	Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	1	Jumlah PD dan Masyarakat yang mengikuti sosialisasi	3755 peserta		751 peserta	751 peserta	100	700 org	700 org	40
4.05.4.05.03.1.9.03.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi yang disusun	5 dok		1 dok	1 dok	100			20
		2	Jumlah Pengguna LPSE yang difasilitasi	3750 pengguna		750 pengguna	27000 pengguna	3600			20
		3	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	5 aplikasi		1 aplikasi	1 aplikasi	100			20
4.05.4.05.03.26.	Program Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan	1	Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi secara elektronik	100		100	99	99	100	199	199

4.05.4.05.03.2 0.01.	Pengelolaan administrasi pengadaan barang/jasa	1	Jumlah Dokumen Data Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	12		12	12	100			100
		2	Jumlah Dokumen Hasil Tender	300					100	100	33,33
4.05.4.05.03.2 0.02.	Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	1	Jumlah Sosialisasi/Pelatihan/Bimtek/Pendampingan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3		2	2	100	1	1	33,33
4.05.4.05.03.2 0.03.	Pelaksanaan dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang / Jasa	1	Dokumen Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Secara e-Tendering	400		400	217	54			
4.05.4.05.03.2 0.04.	Pengelolaan LPSE	1	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	2		2	2	100			200
4.05.4.05.03.23	Program Koordinasi dan penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	Jumlah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	100		100	100	100	100	100	100
4.05.4.05.03.2 3.01	Koordinasi bidang pendidikan, kebudayaan dan keagamaan	1	Jumlah Koordinasi Bidang Pendidikan kebudayaan dan keagamaan	33 kali		33 kali	32 kali	96,9	33 kali	32 kali	96,9
4.05.4.05.03.2 3.02	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan	1	Jumlah kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	11 keg		11 keg	11 keg	100			100
4.05.4.05.03.2 3.03.	Koordinasi bidang tenaga kerja dan kependudukan	1	jumlah koordinasi bidang tenaga kerja dan kependudukan	21 kali		21 kali	19 kali	90,5	21	21	100
4.05.4.05.03.2 3.03	Koordinasi bidang sosial, keagamaan dan kesehatan	1	Jumlah koordinasi sosial, keagamaan dan kesehatan	33 kali		33 kali	32 kali	96,9	33 kali	32 kali	96,9
4.05.4.05.03.37.	Program Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	1	Jumlah informasi pemerintahan dan pembangunan	100		100	100	100			100
4.05.4.05.03.42.	Program Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	Jumlah informasi pemerintahan dan pembangunan	100					100	100	100
4.05.4.05.03.3 7.02.	Fasilitasi pemberitaan dan penyebarluasan informasi	1	Jumlah pertemuan dengan wartawan	7 kali		7 kali	4 kali	57			

4.05.4.05.03.4 2.02	Fasilitasi komunikasi pimpinan	1	Jumlah kunjungan kerja pejabat negara yang difasilitasi	60 kunjungan				12 kunjungan	12 kunjungan		20
4.05.4.05.03.2 2.01	Fasilitasi acara dan dokumentasi	1	Jumlah acara dan dokumentasi	240 kegiatan		240 kegiatan	210 kegiatan	88			36
4.05.4.05.03.4 2.03	Fasilitasi dokumentasi pimpinan	1	Jumlah dokumentasi acara pimpinan	1000 kegiatan					200 kegiatan	200 kegiatan	20
4.05.4.05.03.3 7.04	Fasilitasi kehumasan dan keprotokolan	1	Jumlah dokumentasi acara pimpinan	310 kegiatan		310 kegiatan	232 kegiatan	75			20
4.05.4.05.03.2 2.03	Fasilitasi keprotokoleran	1	Jumlah kegiatan keprotokoleran acara pimpinan	1500 kegiatan					300 kegiatan	300 kegiatan	20
4.05.	NON URUSAN										
4.05.4.05.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi	100					100	100	100
4.01.4.01.03.0 1.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah surat yang terkirim selama satu tahun dan	10 000		10 000	10 000	100	10 000	10 000	100
4.01.4.01.03.0 1.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah rekening pemakaian jasa komunikasi (telepon, air, 43 Rekening listrik dan tv kabel	43		43	43	100	43	43	100
4.01.4.01.03.0 1.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah1	1	Jumlah Jaminan atas Barang Milik Daerah	3		3	3	100	3	3	100
4.01.4.01.03.0 1.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Jumlah Pemeliharaan Surat-Surat Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	71		71	71	100	71	71	100
4.01.4.01.03.0 1.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Kantor	91		91	91	100	91	91	100
4.01.4.01.03.0 10.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor	76		76	76	100	76	76	100

4.01.4.01.03.0 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Jumlah surat-surat/blanko/formulir yang di perbanyak (cetak dan fotocopy/enggandaan)	24		24	24	100	24	24	100
4.01.4.01.03.0 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah kebutuhan pergantian untuk komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	45		45	45	100	45	45	100
4.01.4.01.03.0 1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Memadai dan Layak Pakai	11		11	11	100	11	11	100
4.01.4.01.03.0 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga untuk Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	3		3	3	100	3	3	100
4.01.4.01.03.0 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	Jumlah bahan bacaan koran dan majalah untuk Kantor Bupati Sampang dan Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	1572		1572	1572	100	1572	1572	100
4.01.4.01.03.0 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Jumlah bahan logistik dan juru masak berikut pramusaji untuk rumah dina Bupati dan Wakil Bupati Sampang	12		12	2	100	12	2	100
4.01.4.01.03.0 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	1	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat, tamu di Kantor Bupati Sampang dan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	22		22	22	100	22	22	100
4.01.4.01.03.0 1.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1	Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yang diikuti untuk menyamakan persepsi antar daerah	1473		1473	1473	100	1473	1473	100
4.01.4.01.03.0 1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis	1	Indeks Kepuasan Masarakat (IKM) terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah	8		8	8	100	8	8	100
4.01.4.01.03.0 1.20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1	Jumlah koordinasi dengan SKPD di kabupaten sampang	299		299	299	100	299	299	100

4.05.4.05.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		100	100	100	100	100	100
4.01.4.01.03.0 2.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Jumlah kendaraan dinas/operasional (sepeda motor dinas)	1		1	1	100	1	1	100
4.01.4.01.03.0 2.05	Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	1	Jumlah perlengkapan rumah tangga untuk rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Sampang	6		6	6	100	6	6	100
4.01.4.01.03.0 2.10	Pengadaan Meubelair	1	Jumlah kebutuhan meubelair yang layak pakai untuk prasarana kantor	23 dan 1		23 dan 1	23 dan 1	100	23 dan 1	23 dan 1	100
4.01.4.01.03.0 2.11	Pengadaan Komputer	1	Jumlah peralatan komputer sebagai penunjang pekerjaan	5		5	5	100	5	5	100
4.01.4.01.03.0 2.12	Pengadaan Peralatan Kantor	1	Jumlah Peralatan kantor untuk produktifitas kerja PNS	5 dan 1		5 dan 1	5 dan 1	100	5 dan 1	5 dan 1	100
4.01.4.01.03.0 2.16	Pengadaan alat-alat Komunikasi	1	Jumlah alat-alat komunikasi	10		10	10	100	10	10	100
4.01.4.01.03.0 2.19	Pengadaan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah perlengkapan kantor untuk produktifitas kerja PNS	12		12	12	100	12	12	100
4.01.4.01.03.0 2.20	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan	1	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	3		3	3	100	3	3	100
4.01.4.01.03.0 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1		1	1	100	1	1	100
4.01.4.01.03.0 2.23	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	1	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan yang layak pakai	10		10	10	100	10	10	100
4.01.4.01.03.0 2.24	Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang Layak	20		20	20	100	20	20	100

4.01.4.01.03.0 2.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	1	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Meubelair	80		80	80	100	80	80	100
4.01.4.01.03.0 2.30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan/ perlengkapan kantor dalam kondisi layak pakai	258		258	258	100	258	258	100
4.01.4.01.03.0 2.34	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	1	Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan untuk rumah jabatan dinas	2		2	2	100	2	2	100
4.05.4.05.03. 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Persentase aparatur yang berpakaian dinas sesuai	100		100	100	100	100	100	100
4.01.4.01.03.0 3.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1	jumlah pembuatan pakaian dinas KDH/ WKDH untuk bupati, PDH untuk sekda, Ajudan Bupati dan wakil bupati	12		12	12	100	12	12	100
4.01.4.01.03.0 3.02	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	1	Jumlah pakaian kerja lapangan untuk petugas kebersihan rumah dinas	25		25	25	100	25	25	100
4.05.4.05.03. 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100		100	100	100	100	100	100
4.01.4.01.03.0 5.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1	Jumlah PNS yang wajib meningkatkan keterampilan teknis di lingkungan sekretariat daerah kabupaten sampang	6 dari 145		6 dari 145	6 dari 145	100	6 dari 145	6 dari 145	100
4.05.4.05.03. 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100		100	100	100	100	100	100
4.01.4.01.03.0 6.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1	Jumlah Laporan Semesteran Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	1		1	1	100	1	1	100

4.01.4.01.03.0 6.04			Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD	1		1	1	100	1	1	100
4.01.4.01.03.0 6.05			Jumlah Laporan RKA dan DPA SKPD tahun berikutnya	2		2	2	100	2	2	100
		1.	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	0,76		0,10	0,10	100	0,10	0,10	100
4.05.	URUSAN PEMERINTAHAN										
4.05.4.05.03.1 9.06.	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat/ IKM	1	Jumlah SKM PD yang di susun	42		42	42	100	42	42	100
4.05.4.05.03.21.	Program Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah	1	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	125		35	36	102,86	42	42	100
		2	Kontribusi BUMD terhadap PAD (%)	28,47%		3,81%	3,69%	96,85	12.05%	12.05%	100
4.01.4.01.03.2 1.01.	Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan Sumber Daya Alam	1	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan TSP	355		50	50	100	50	50	100
		2	Jumlah pelaksanaan jasmas di kecamatan	5		5	5	100			
		3	Jumlah survey lokasi yang dilakukan	5		5	5	100			
		4	Koordinasi dengan SKPD terkait mengenai pengelolaan SDA	107					12	12	100
4.01.4.01.03.2 1.02.	Koordinasi Pelayanan Sarana Perekonomian	1	Jumlah koordinasi dengan OPD terkait mengenai inflasi daerah, ekonomi kreatif dan pengembangan UMKM	32		32	34	106			
		2	Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi kreatif	20		20	20	100			
		3	Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi kreatif, agribisnis dan pariwisata	148					24	24	100

		4	Jumlah koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait 5 mengenai inflasi daerah, ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, pameran, agribisnis dan pariwisata	225					36	36	100
4.01.4.01.03.2 1.03.	Koordinasi dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1	Jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap BUMD	217		30	35	116,667	33	33	100
		2	Jumlah fasilitasi dan koordinasi kegiatan BUMD	504		78	117	150	80	80	100
		3	Audit Apotek Trunojoyo Sampang	1					1	1	100
4.05.4.05.03.24.	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	1	Persentase peserta sosialisasi yang memahami ketentuan di bidang cukai	100		100	100	100	100	100	100
4.01.4.01.03.2 4.01.	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan evaluasi atas pelayanan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi ketentuan di bidang cukai	2024		524	524	200	300	300	100
4.05.4.05.03.25.	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	1	Persentase jumlah merk rokok ilegal yang dilaporkan ke bea cukai	100		100	100	100	100	100	100
4.01.4.01.03.2 5.01.	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran/tempat penjual eceran	1	Monitoring peredaran rokok ilegal	42		42	42	100			

		2	Pembuatan dokumen/laporan cukai rokok ilegal	1		1	1	100			
--	--	---	--	---	--	---	---	-----	--	--	--

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2018 nihil, dikarenakan Periode Resntra Sekretariat Daerah adalah Tahun 2019-2024, sehingga yang dapat dinilai hanya Tahun 2019 saja; dan
2. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2019 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.
3. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pergeseran karena direncanakan perubahan pada SOTK Sekretariat Daerah yang baru.

Pada tahun anggaran 2019 anggaran Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang sebesar Rp.35.188.551.784,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.11.055.954.084,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.24.132.597.700,00 dengan total realisasi sebesar Rp.32.956.866.251,00 (93,6%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.10.538.523.360,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.22.418.342.891,00. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 15 program dan 45 kegiatan.

Realisasi dan faktor penyebab program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :

Anggaran Sekretariat Daerah pada tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1)	Bagian Umum	23.482.096.526,00	22.464.743.827,00	95,67
2)	Bagian Pemerintahan	1.379.020.000,00	1.349.415.363,00	97,85
3)	Bagian Hukum	984.457.000,00	937.028.891,00	95,18
4)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3.130.067.650,00	2.692.663.189,00	86,03
5)	Bagian Perekonomian dan SDA	417.908.100,00	394.761.177,00	94,46
6)	Bagian Administrasi Pembangunan	1.119.080.500,00	1.060.770.007,00	94,79
7)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	766.916.800,00	722.780.046,00	94,24
8)	Bagian Organisasi	1.413.326.000,00	1.200.215.859,00	70,26
9)	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	809.534.000,00	584.429.933,00	72,19

Berdasarkan tabel pelaksanaan program dan kegiatan terdapat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Perekonomian dan SDA Tahun Anggaran 2019 Program Fasilitas Peningkatan Ekonomi Daerah untuk indikator Kontribusi BUMD terhadap PAD berhasil memberikan kontribusi sebesar
- Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020*

3,69% dengan target kontribusi sebesar 3,81% atau dengan kata lain capaian indikator output ini sebesar 96,85% dari target yang direncanakan. Rincian capaian indikator Kontribusi BUMD PAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 diperoleh dari nilai PAD BUMD (hasil kekayaan daerah yang dipisahkan) sebesar Rp. 6.236.679.300,72 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah tujuh puluh dua sen) sedangkan total PAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 168.778.008.507,65 (seratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah enam puluh lima sen). Secara kuantitatif realisasi nilai PAD BUMD (hasil kekayaan yang dipisahkan) tersebut sudah melebihi target nilai PAD BUMD (hasil kekayaan yang dipisahkan) untuk tahun anggaran 2019, yakni Rp. 6.206.365.750,35 (enam milyar dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah tiga puluh lima sen). Namun karena realisasi PAD Kabupaten Sampang nilainya diatas nilai target PAD kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 yakni Rp. 162.994.854.462,35 (seratus enam puluh dua milyar sembilan ratus sembilan empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh lima sen). Sehingga nilai akhir perhitungan persentase kontribusi BUMD terhadap PAD lebih kecil dibandingkan target perhitungan persentase kontribusi BUMD terhadap PAD untuk Tahun Anggaran 2019. Sehingga untuk tahun berikutnya perl dilakukan Penentuan Target PAD Kabupaten Sampang untuk Tahun Anggaran berikutnya harus ditingkatkan. Sehingga mampu memacu BUMD Kabupaten Sampang untuk lebih meningkatkan kinerja di Tahun Anggaran berikutnya.

- 2) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan atau Bagian Humas Tahun Anggaran 2019 yang pada tahun 2020 terdapat perubahan nomenklatur menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Program hubungan masyarakat dan keprotokolan Pelaksanaan *Pers Gathering* pada tahun 2019 menyesuaikan jadwal Yth. Bupati Sampang. Selain itu, perubahan kebijakan dari semula dilaksanakan sebulan sekali menjadi tiga bulan sekali, kemudian Belanja Kegiatan Dokumentasi menyesuaikan kegiatan Yth. Bupati Sampang dan Belanja lembur pada Sub Bagian Keprotokolan tidak bisa terserap karena sudah digantikan dengan adanya TPP.
- 3) Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang / Jasatidak mencapai target dengan alasan :

Kegiatan ini bersifat insidental yaitu dalam hal pencapaian target jumlah paket yang dilaksanakan secara e-Tendering. Pencapaian target menyesuaikan dengan jumlah permohonan paket pelelangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berada di masing-masing Perangkat Daerah maupun penggunaan tenaga ahli karena hal ini menyesuaikan dengan permintaan pokja pengadaan selama proses pelelangan.

Jumlah paket pengadaan barang yang seharusnya e-tender berubah menjadi e-Purchasing karena barangnya tercantum di dalam e-katalog.

Adanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana terdapat perubahan pada batasan nilai maksimal Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi juga mempengaruhi jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan secara e-Tendering.

Tidak dilakukan perubahan target kinerja pada Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) TA. 2019.

Solusi. Menetapkan target kinerja yang wajar sesuai dengan evaluasi pencapaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran lebih berhati-hati lagi dan diperhitungkan secara matang sesuai dengan indikator kinerja yang ditargetkan.

- 4). Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Perekonomian dan SDA Tahun Anggaran 2019 Program Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah untuk indikator Kontribusi BUMD terhadap PAD berhasil memberikan kontribusi sebesar 3,69% dengan target kontribusi sebesar 3,81% atau dengan kata lain capaian indikator output ini sebesar 96,85% dari target yang direncanakan.

Rincian capaian indikator Kontribusi BUMD PAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 diperoleh dari nilai PAD BUMD (hasil kekayaan daerah yang dipisahkan) sebesar Rp. 6.236.679.300,72 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah tujuh puluh dua sen) sedangkan total PAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 168.778.008.507,65 (seratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah enam puluh lima sen).

Secara kuantitatif realisasi nilai PAD BUMD (hasil kekayaan yang dipisahkan) tersebut sudah melebihi target nilai PAD BUMD (hasil kekayaan yang dipisahkan) untuk tahun anggaran 2019, yakni Rp. 6.206.365.750,35 (enam milyar dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah tiga puluh lima sen). Namun karena realisasi PAD Kabupaten Sampang nilainya diatas nilai target PAD kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 yakni

Rp. 162.994.854.462,35 (seratus enam puluh dua milyar sembilan ratus sembilan empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh lima sen).

Sehingga nilai akhir perhitungan persentase kontribusi BUMD terhadap PAD lebih kecil dibandingkan target perhitungan persentase kontribusi BUMD terhadap PAD untuk Tahun Anggaran 2019.

Solusi

Penentuan Target PAD Kabupaten Sampang untuk Tahun Anggaran berikutnya harus ditingkatkan. Sehingga mampu memacu BUMD Kabupaten Sampang untuk lebih meningkatkan kinerja di Tahun Anggaran berikutnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah 2019-2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Tahun 2019-2024				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Sakip			B	80,01/A	82/A	84/A	64,23/B	80,01/A	82/A	84/A	
a.	Nilai EKPPD			3,5	3,1	3,21	3,22	2,83	3,1	3,21	3,22	
b.	Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum d. Bidang Perekonomian e. Bidang Barjas f. Bidang Pembangunan g. Bidang Organisasi h. Bidang Humas i. Bidang Umum			N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	
c.	Nilai Sakip											
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			82	81,05	81,55	81,75	80,40	81,05	81,55	81,75	
a	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			82	81,05	81,55	81,75	80,40	81,05	81,55	81,75	
3	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif			0,76	0,10	0,06	0,03	0,76	0,10	0,06	0,03	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Tahun 2019-2024				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
a	Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi pemkab		100%	100%				100%				
5	Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan Pemkab		100%	100%				100%				
6	Persentase penataan otonomi daerah yang diadministrasikan		100%	100%				100%				
7	Persentase Kecamatan yang dilaksanakan Pembinaan		100%	100%				100%				
8	Laporan Penyelesaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang berkualitas		16 Februari	16 Februari				16 Februari				
9	Persentase PD yang menyusun Anforjab		100%	100%				100%				
10	Persentase Peraturan Bupati yang diundangkan tepat waktu		100%	100%				100%				
11	Persentase Keputusan Bupati yang diundangkan tepat waktu		100%	100%				100%				
12	Persentase Perda yang diundangkan tepat waktu		100%	100%				100%				
13	Persentase Perda yang dilakukan konsultasi publik		100%	100%				100%				
14	Persentase Kasus Hukum yang difasilitasi		100%	100%				100%				
15	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan tepat waktu		100%	100%				100%				
16	Persentase paket pengadaan b/j yang dilaksanakan secara e-Tendering		100%	100%				100%				
17	Persentase koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang difasilitasi		100%	5				5				
18	Persentase Kegiatan Pemerintah yang dipublikasikan		100%	4				4				
19	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu		100%	100%				100%				

Jika dilihat tabel di atas, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang mendapatkan nilai 64,99 atau predikat “B”. Penilaian tersebut menunjukkan akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.6 Hasil Capaian Nilai SAKIP Tahun 2018 dan 2019

Komponen yang dinilai		2018		2019	
		Bobot	Bobot	Bobot	Bobot
A	Perencanaan kinerja	30	19,00	30	23,14
B	Pengukuran kinerja	25	13,69	25	16,79
C	Pelaporan kinerja	15	9,15	15	9,98
D	Evaluasi internal	10	3,13	10	5,83
E	Capaian kinerja	20	10,85	20	9,24
Nilai hasil evaluasi		100	64,23	100	64,99
Tingkat akuntabilitas kinerja			B		B

Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2019 :

1. Secara umum terdapat peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Sampang meskipun belum signifikan, Pemerintah Kabupaten telah menyusun RPJMD dengan ukuran keberhasilan yang lebih baik, akan tetapi perlu dibuktikan lagi *sustainability* atas dokumen perencanaan yang telah disusun.
2. Tema Pembangunan yang tertera dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya menjadi dasar pembangunan kinerja tahun berkenaan. Hal ini tersebut terlihat pada proses penganggaran dan program prioritas.
3. Penyusunan peta proses bisnis organisasi, cascading kinerja dan cross-cutting pencapaian kinerja pada RPJMD belum sepenuhnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dan pola hubungan kinerja antar level belum terlihat dengan baik.
4. Perencanaan Kinerja dan peta proses bisnis organisasi pada satuan kerja belum dijabarkan dengan baik pada dokumen penganggaran.
5. Upaya pengendalian dan evaluasi yang dilakukan masih sebatas pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran, sehingga belum bisa dikelompokkan antara program prioritas dan non prioritas. Selain itu, terdapat kecenderungan belum

adanya review atas keberadaan kegiatan yang ada untuk menjawab permasalahan dan isu strategis terkini.

Upaya perbaikan SAKIP Tahun 2020 :

1. Menyempurnakan peta proses yang ada dengan mencermati kembali hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan Pemerintah daerah dan menjadikannya sebagai dasar penyusunan cascading kinerja serta evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah
 2. Meningkatkan upaya implementasi manajemen kinerja dengan menggunakan dokumen perencanaan benar-benar sebagai pedoman pelaksanaan kerja
 3. Agar setiap Perangkat Daerah melakukan penyusunan peta proses bisnis dan cascading kinerja berdasarkan RPJMD mulai dari eselon II sampai pejabat pelaksana dalam upaya mempengaruhi kualitas pengukuran capaian kinerja dalam upaya mencapai tujuan organisasi/instansi
 4. Dalam rangka optimalisasi implementasi SAKIP, diperlukan aplikasi manajemen kinerja yang diharapkan benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai bank data dan dasar perencanaan kinerja
 5. Meningkatkan kolaborasi antar Perangkat Daerah pengampu akuntabilitas kinerja (Bapelitbangda, Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Setda) sehingga pelaksanaan akuntabilitas kinerja lebih cepat dan terarah.
-
2. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) di tingkat Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang mendapatkan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan skor 3,3114 atau dengan kategori prestasi tinggi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD Tahun 2018. Sedangkan perkembangan nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperoleh Kabupaten Sampang selama periode sebelumnya adalah sebagaimana tersaji dalam grafik III.2.
 3. Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, bidang Kesra, bidang Hukum, bidang Barjas, bidang Pembangunan bidang Organisasi, bidang Humas dan bidang Umum sesuai dengan tugas dalam menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dengan target kinerja 100% pada tahun 2019 mencapai target dengan realisasi 100%
 4. Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat diperoleh melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat. Pada tahun 2019, berdasarkan hasil survey pada beberapa perangkat daerah dan unit kerja, diperoleh nilai sebesar 81,3. Hasil ini merupakan

hasil yang didapatkan dari hasil Total Jumlah Nilai IKM SKPD Kabupaten Sampang dibagi dengan Jumlah SKPD Kabupaten Sampang

$$\text{Didapat : } \frac{\text{Jumlah Nilai Total IKM SKPD Kab Sampang}}{\text{Jumlah Total SKPD Kab Sampang yang di IKM}} = \frac{3.739,90}{46} = 81,30$$

5. Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan Bidang Perekonomian sesuai dengan tugas dalam menyelenggaran fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dengan target kinerja 100% pada tahun 2019 mencapai target dengan realisasi 130% dari 10 kebijakan dengan realisasi mencapai 13 rumusan kebijakan menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat.
6. Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, bidang Kesra, bidang Hukum, bidang Barjas, bidang Pembangunan bidang Organisasi, bidang Humas dan bidang Umum sesuai dengan tugas dalam menyelenggaran fungsi pengokordinasian penyusunan kebijakan Daerah dengan target kinerja 100% pada tahun 2019 mencapai target dengan realisasi 100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Sebagaimana termuat dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kinerja Kabupaten Sampang masih dalam kategori B
2. Rumusan kebijakan sekretariat daerah belum memenuhi kaidah prosedur dan mekanisme yang tepat
3. Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik kurang baik dan kejelasan mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa.

Oleh karena itu isu-isu strategis diatas yang harus ditindaklanjuti pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang 1 (satu) tahun ke depan adalah :

1. setiap Perangkat Daerah melakukan penyusunan peta proses bisnis dan cascading kinerja berdasarkan RPJMD mulai dari eselon II sampai pejabat pelaksana dalam upaya mempengaruhi kualitas pengukuran capaian kinerja dalam upaya mencapai tujuan organisasi/instansi
2. Perlunya Rumusan kebijakan yang difasilitasi penyusunannya oleh sekretariat daerah memenuhi kaidah prosedur dan mekanisme yang tepat serta mengandung aspek-aspek regulasi yang jelas, pasti dan adil serta dapat dilaksanakan melalui koordinasi

yang sinergis antara unit-unit kerja pemerintah daerah secara efisien dan efektif

3. Perbaiki Prosedur pelayanan publik/SOP seperti revitalisasi, restrukturisasi, dan deregulasi di bidang pelayanan publik serta peningkatan profesionalisme pejabat pelayan publik.

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang sebagai pengampu urusan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan memiliki pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur Peraturan Bupati Sampang No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Dan Staf Ahli Bupati Sampang Kabupaten Sampang. Dalam menyelenggarakan tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif; yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dapat diukur dari :

- a. Adanya peningkatan predikat SAKIP khususnya dilingkungan Sekretariat Daerah ;
- b. Adanya peningkatan perbaikan Rumusan kebijakan melalui koordinasi antar bagian dilingkungan Sekretariat Daerah ;
- c. Adanya peningkatan Indeks Kualitas Pelayanan publik khususnya dilingkungan Sekretariat Daerah.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang antara lain:

- a. Upaya pengendalian dan evaluasi yang dilakukan masih sebatas pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran dan masih terdapat kecenderungan belum adanya review atas keberadaan kegiatan yang ada untuk menjawab permasalahan dan isu strategis terkini.
- b. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat.
- c. Prosedur pelayanan publik terlalu kaku, berbelit-belit, biaya dan waktu tidak jelas, tidak ada SOP/tidak dijalankan, dan ada persyaratan yang tidak menyambung/rasional

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang antara lain :

- a. Jumlah kualitas sumber daya manusia (SDM) Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang masih kurang mengakibatkan adanya program kerja yang belum dapat dilaksanakan secara optimal;
- b. Sarana dan prasarana yang dimiliki belum memenuhi kebutuhan pelayanan;
- c. Pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi belum optimal.

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Visi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah **“Sampang Hebat Bermartabat”**.

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, disusunlah misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik;
5. Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu.

Keterkaitan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dengan Misi Kepala daerah adalah pada **misi 4** yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang menghadapi tantangan sebagai berikut :

- a. Semakin menguatnya kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah dan tuntutan aparatur sipil negara yang profesional;
- b. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik
- c. Masih adanya ketidakselarasan kebijakan antar lembaga di pemerintah pusat dan kebijakan yang berubah-ubah;

Sedangkan peluang yang ada antara lain :

- a. Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan Menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang secara ideal;
- b. Adanya dukungan dan peran serta para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
- c. Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan pelayanan; dan
- d. Perkembangan teknologi dan informasi.

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan kinerja perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan reward and punishment
- b. Pengumpulan data kinerja harus dilakukan secara berkala dan tampak dalam laporan pengukuran kinerja;
- c. Pengukuran kinerja dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi;

- d. IKU harus dimanfaatkan untuk dokumen perencanaan dan penganggaran;
- e. Hasil pengukuran kinerja harus memberikan dampak terhadap perolehan reward and punishment;
- f. IKU harus dilakukan reviu untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kepentingan organisasi;
- g. Laporan kinerja perlu disempurnakan dengan menyajikan sumber daya secara lengkap dalam dokumen serta informasi kinerja dibuat secara rinci dan detail sehingga andal
- h. Informasi kinerja harus dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan, program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja;
- i. Melakukan rencana aksi untuk mengendalikan kinerja
- j. Melakukan pemantauan rencana aksi untuk memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan;
- k. Informasi kinerja harus dapat digunakan seluruhnya dalam perbaikan perencanaan; dan
- l. Meningkatkan capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2021 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 dengan kebutuhan riil Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Sampang

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.	PEMERINTAHAN				51,236,571,159	PEMERINTAHAN				51,236,571,159
4.05.4.05.03.0 1.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran		Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100%	6.230.010.260	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran		Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100%	6.230.010.260
4.01.4.01.01.0 1.01.	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Sekretariat Daerah	a. Jumlah surat yang terkirim selama satu tahun	10.000 Surat	3.402.864.665	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Sekretariat Daerah	a. Jumlah surat yang terkirim selama satu tahun	10.000 Surat	3.402.864.665
			b. Jumlah jaminan atas barang milik daerah	3 jenis	-			b. Jumlah jaminan atas barang milik daerah	3 jenis	-
			c. Cakupan pemenuhan kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi	12 bulan	-			c. Cakupan pemenuhan kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi	12 bulan	-
			d. Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1536 eksemplar	-			d. Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1536 eksemplar	-
			e. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan	94 unit	-			e. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan	94 unit	-
			f. Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan	22 jenis	-			f. Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan	22 jenis	-
			g. Jumlah Tenaga Honor Daerah	7 orang	-			g. Jumlah Tenaga Honor Daerah	7 orang	-
4.05.4.05.03.0 1.02.	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	a. Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	74 jenis	1.393.845.595	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	a. Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	74 jenis	1.393.845.595
			b. Jumlah alat kebersihan yang disediakan	90 jenis				b. Jumlah alat kebersihan yang disediakan	90 jenis	
			c. Jumlah bahan logistik dan juru masak berikut pramusaji untuk rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Sampang	12 bulan				c. Jumlah bahan logistik dan juru masak berikut pramusaji untuk rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Sampang	12 bulan	
			d. Jumlah kebutuhan peralatan dan	9 jenis				d. Jumlah kebutuhan peralatan dan	9 jenis	-

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			perlengkapan kantor yang memadai dan layak pakai					perlengkapan kantor yang memadai dan layak pakai		
			e. Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga untuk rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	3 Rumah Dinas				e. Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga untuk rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	3 Rumah Dinas	-
			f. Jumlah kebutuhan pergantian untuk komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	38 jenis				f. Jumlah kebutuhan pergantian untuk komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	38 jenis	
4.05.4.05.03.0 1.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	a. Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yang diikuti untuk menyamakan persepsi antar daerah	1391 kali	1.433.300.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	a. Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yang diikuti untuk menyamakan persepsi antar daerah	1391 kali	1.433.300.000
			b. Jumlah koordinasi dengan SKPD di Kabupaten Sampang	403 kali	-			b. Jumlah koordinasi dengan SKPD di Kabupaten Sampang	403 kali	-
4.05.4.05.03.0 2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	9.405.114.680	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	9.405.114.680
4.01.4.01.01.0 2.01.	Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor	Sekretariat Daerah	a. Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan gedung kantor	1 gedung kantor	833.801.435	Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor	Sekretariat Daerah	a. Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan gedung kantor	1 gedung kantor	833.801.435
			b. Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 gedung kantor				b. Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 gedung kantor	
4.05.4.05.03.0 2.02.	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Rumah Jabatan	Sekretariat Daerah dan Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati	a. Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan untuk rumah jabatan dinas	3 Rumah Dinas	1.211.969.920			b. Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan untuk rumah jabatan dinas	3 Rumah Dinas	1.211.969.920
			c. Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala rumah	3 Rumah Dinas				d. Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala rumah	3 Rumah Dinas	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			jabatan untuk Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang					jabatan untuk Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang		
4.05.4.05.03.0 2.03.	Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas opearsional	Sekretariat Daerah	a. Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Bupati (5 unit); Wakil Bupati (2 unit); Sekretaris Daerah (2 unit); Asisten (3 unit); Staf Ahli (3 unit); Kepala Bagian (9 unit); Tangki Air (1 unit); Pick Up (2 unit); Pool (5 unit)	32 Unit	6.583.385.000	Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas opearsional	Sekretariat Daerah	a. Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Bupati (5 unit); Wakil Bupati (2 unit); Sekretaris Daerah (2 unit); Asisten (3 unit); Staf Ahli (3 unit); Kepala Bagian (9 unit); Tangki Air (1 unit); Pick Up (2 unit); Pool (5 unit)	32 Unit	6.583.385.000
			b. Jumlah pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati	2 Unit				b. Jumlah pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati	2 Unit	
			c. Jumlah pengadaan kendaraan dinas untuk Forkopimda	4 Unit				c. Jumlah pengadaan kendaraan dinas untuk Forkopimda	4 Unit	
4.05.4.05.03.0 2.04.	Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat Daerah	a. Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	36 unit	652.958.500	Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat Daerah	a. Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	36 unit	652.958.500
			b. Jumlah pengadaan alat rumah tangga, computer dan meja/kursi kerja pejabat	44 unit				b. Jumlah pengadaan alat rumah tangga, computer dan meja/kursi kerja pejabat	44 unit	
4.05.4.05.03.0 2.07.	Pengadaan Pakaian Dinas		a. Jumlah pembuatan Pakaian Dinas KDH/WKDH untuk Bupati dan Wakil Bupati, PDH untuk Sekda dan Ajudan Bupati dan Wakil Bupati	50 orang	122.999.825	Pengadaan Pakaian Dinas		a. Jumlah pembuatan Pakaian Dinas KDH/WKDH untuk Bupati dan Wakil Bupati, PDH untuk Sekda dan Ajudan Bupati dan Wakil Bupati	50 orang	122.999.825
			b. Jumlah pakaian kerja lapangan untuk Kasubag. RT beserta staf dan	50 orang				b. Jumlah pakaian kerja lapangan untuk Kasubag. RT beserta staf	50 orang	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			petugas kebersihan rumah dinas					dan petugas kebersihan rumah dinas		
4.05.4.05.03.0 3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	251.122.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	251.122.000
4.05.4.05.03.0 3.01.	Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	Luar Daerah	Jumlah PNS yang wajib meningkatkan keterampilan teknis di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Sampang berikut kewajiban Bupati mengikuti Lemhanas	11 orang	410.500.000	Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	Luar Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar	12 ASN	251.122.000
4.05.4.05.03.0 4.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100%	45.000.000	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100%	45.000.000
4.05.4.05.03.0 4.01.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Sekretariat Daerah	a. Jumlah Laporan Kemajuan fisik /Non fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LkjIP	6 Dok	8.536.825	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	6 Dok	15.000.000
			a. Jumlah Laporan Akhir Tahun sebelumnya SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	6 Dok						
4.05.4.05.03.0 4.02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan RKA dan DPA SKPD Tahun berikutnya	4 Dok	16.028.675	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	3 Dok	15.000.000
4.05.4.05.03.0 4.03.	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Sekretariat Daerah	Jumlah promosi pelayanan perangkat daerah	2 paket	15.700.000	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen SKM	1 Dok	15.000.000
4.05.4.05.03.15	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Persentase pelayanan kedinasan KDH/WKDH yang difasilitasi	100%	2.099.995.000	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Persentase pelayanan kedinasan KDH/WKDH yang difasilitasi	100%	2.099.995.000

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.4.05.03.15 .01.	Fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	a.Jumlah kunjungan kerja / inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	369 kali	2.068.245.000		Sekretariat Daerah	a.Jumlah kunjungan kerja / inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	369 kali	2.068.245.000
			b.Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	409 kali				b.Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	409 kali	
4.05.4.05.03.15 .02.	Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Keluarga Bupati dan Wakil Bupati	4 keluarga	31.750.000	Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Keluarga Bupati dan Wakil Bupati	4 keluarga	31.750.000
4.05.4.05.03.16	Program Fasilitasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah		Persentase fasilitasi pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah	100%	999.550.000		Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah	100%	999.550.000
4.05.4.05.03.16.01	Fasilitasi administrasi pemerintahan	Sekretariat Daerah	jumlah dialog/audiensi yang dilaksanakan	14 kali	170.000.000		Sekretariat Daerah	jumlah dialog/audiensi yang dilaksanakan	14 kali	170.000.000
4.05.4.05.03.16.02	Fasilitasi administrasi kewilayahan	Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen rupabumi/toponomi	1 dok dan peta	320.000.000		Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen rupabumi/toponomi	1 dok dan peta	320.000.000
4.05.4.05.03.16.03	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim otoda	Sekretariat Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim otoda	24 dok	150.000.000		Sekretariat Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim otoda	24 dok	150.000.000
4.05.4.05.03.16.04	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sekretariat Daerah	jumlah dokumen penyusunan lppd dan ilppd yang disusun	2 dok	229.550.000		Sekretariat Daerah	jumlah dokumen penyusunan lppd dan ilppd yang disusun	2 dok	229.550.000
4.05.4.05.03.16.05	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan administrasi	14 kec	130.000.000		Sekretariat Daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan administrasi	14 kec	130.000.000
4.05.4.05.03.17	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		a. Persentase Produk Hukum yang diundangkan b. Persentase Penyelesaian Kasus Hukum Perdata	100% 100%	1.012.165.740			c. Persentase Produk Hukum yang diundangkan d. Persentase Penyelesaian Kasus Hukum Perdata	100% 100%	1.012.165.740

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pemerintah Daerah yang ditangani					Pemerintah Daerah yang ditangani		
4.05.4.05.03.17.01	Penyusunan Produk Hukum	Sekretariat Daerah	a. Jumlah Perda yang diundangkan	7 perda	430.401.275		Sekretariat Daerah	b. Jumlah Perda yang diundangkan	7 perda	430.401.275
			b. Jumlah Perbup yang diundangkan	50 Perbup				b. Jumlah Perbup yang diundangkan	50 Perbup	
			a. Jumlah Raperda	5 Raperda				b. Jumlah Raperda	6 Raperda	
			c. Jumlah Keputusan Bupati yang ditetapkan	500 SK				d. Jumlah Keputusan Bupati yang ditetapkan	500 SK	
			e. Jumlah Naskah Akademik	5 Naskah akademik				f. Jumlah Naskah Akademik	5 Naskah akademik	
4.05.4.05.03.17.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah	a. Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum	350 orang	363.320.015		Sekretariat Daerah	b. Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum	350 orang	363.320.015
			c. Jumlah Permasalahan Hukum yang ditangani	4 Kasus				d. Jumlah Permasalahan Hukum yang ditangani	4 Kasus	
			e. Jumlah Kadarkum yang dibina	225 Keluarga				f. Jumlah Kadarkum yang dibina	225 Keluarga	
4.05.4.05.03.17.03	Fasilitasi Dokumentasi dan Informasi	Sekretariat Daerah	Jumlah Produk Hukum yang dipublikasikan berupa buku Bulletin dan Buku Lembaran Daerah, Jumlah peserta sosialisasi	360 buku dan 350 org	218.444.450		Sekretariat Daerah	Jumlah Produk Hukum yang dipublikasikan berupa buku Bulletin dan Buku Lembaran Daerah, Jumlah peserta sosialisasi	360 buku dan 350 org	218.444.450
4.05.4.05.03.18	Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Persentase target kinerja kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan formasi Jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan	100%	1.055.212.375	Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Persentase target kinerja kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan formasi Jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan	100%	1.055.212.375
4.05.4.05.03.18.01	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Sekretariat Daerah	a.Persentase Pelaporan Kinerja Kabupaten Sampang yang berkualitas dan tepat waktu	100%	309.999.825	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Sekretariat Daerah	a.Persentase Pelaporan Kinerja Kabupaten Sampang yang berkualitas dan tepat waktu	100%	309.999.825

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			b.Persentase Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	100%				b.Persentase Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	100%	
4.05.4.05.03.18.02	Penataan Kelembagaan serta Penyusunan Analisis dan Formasi Jabatan	Sekretariat Daerah	a. Persentase Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan sesuai kebutuhan	100%	312.975.350	Penataan Kelembagaan serta Penyusunan Analisis dan Formasi Jabatan	Sekretariat Daerah	a. persentase Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan sesuai kebutuhan	100%	312.975.350
			b.Persentase Evaluasi Jabatan yang sesuai Permenpan	100%				b. Persentase Evaluasi Jabatan yang sesuai Permenpan	100%	
			c.Persentase Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan PNS sesuai SOTK baru	100%				c. Persentase Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan PNS sesuai SOTK baru	100%	
			d.Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	100%				d.Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	100%	
4.05.4.05.03.18.03	Peningkatan Ketatalaksanaan Pemerintah	Sekretariat Daerah	a. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Kode Wilayah dengan baik dan benar	100%	142.254.030		Sekretariat Daerah	b. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Kode Wilayah dengan baik dan benar	100%	142.254.030
			c. Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Tata Naskah Dinas dengan baik dan benar	100%				d. Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Tata Naskah Dinas dengan baik dan benar	100%	
			e. Persentase PNS yang telah memakai Pakaian Dinas dan Atribut dengan baik dan benar	100%				f. Persentase PNS yang telah memakai Pakaian Dinas dan Atribut dengan baik dan benar	100%	
4.05.4.05.03.18.04	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	a. Jumlah Peraturan Bupati tentang RMRB Kabupaten Sampang	1 Perbub	289.983.170		Sekretariat Daerah	b. Jumlah Peraturan Bupati tentang RMRB Kabupaten Sampang	1 Perbub	289.983.170
			c. Persentase OPD yang telah menyusun Rencana Aksi	100 %				d. Persentase OPD yang telah menyusun Rencana	100 %	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(Action Plan) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					Aksi (Action Plan) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
			e. Persentase OPD yang telah di evaluasi Reformasi Birokrasi	100 %				f. Persentase OPD yang telah di evaluasi Reformasi Birokrasi	100 %	
			g. OPD yang mengikuti Kompetisi Budaya Kinerja Tk. Provinsi Jawa Timur	2 OPD				h. OPD yang mengikuti Kompetisi Budaya Kinerja Tk. Provinsi Jawa Timur	2 OPD	
			i. Jumlah Unit Kerja yang diusulkan WBK/WBBM menuju Zona Integritas	8 Unit Kerja				j. Jumlah Unit Kerja yang diusulkan WBK/WBBM menuju Zona Integritas	8 Unit Kerja	
4.05.4.05.03.19	Program Fasilitas Administrasi Pembangunan Daerah		Persentase fasilitas Kegiatan Administrasi Pembangunan Daerah	100%	995.741.664	Program Fasilitas Administrasi Pembangunan Daerah		Persentase fasilitas Kegiatan Administrasi Pembangunan Daerah	100%	995.741.664
4.05.4.05.03.19.01	Koordinasi dan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah buku pedoman, HSPK dan SSHB yang disusun	3 dok	298.538.199	Koordinasi dan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah buku pedoman, HSPK dan SSHB yang disusun	3 dok	298.538.199
4.05.4.05.03.19.02	Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah peserta Sosialisasi	700 org	276908425	Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah peserta Sosialisasi	700 org	276908425
4.05.4.05.03.19.03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretariat Daerah	a. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi yang disusun	1 dok	420.295.040	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretariat Daerah	b. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi yang disusun	1 dok	420.295.040
			c. Jumlah Kegiatan Konstruksi yang diresmikan secara simbolis	10 lokasi				d. Jumlah Kegiatan Konstruksi yang diresmikan secara simbolis	10 lokasi	
4.05.4.05.03.20	Program Fasilitas Unit Layanan Pengadaan		Persentase paket pengadaan barang/jasa yang difasilitasi secara elektronik	100%	1.162.140.425	Program Fasilitas Unit Layanan Pengadaan		Persentase paket pengadaan barang/jasa yang difasilitasi secara elektronik	100%	1.162.140.425
4.05.4.05.03.20.01	Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah	Dokumen Hasil Tender	300 Dok	555.383.765	Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah	Dokumen Hasil Tender	300 Dok	555.383.765

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.4.05.03.20.02	Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah	Jumlah sosialisasi/ pelatihan /pendampingan terkait Pengadaan Barang/ Jasa	3 kali	233.400.500	Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah	Jumlah sosialisasi/ pelatihan /pendampingan terkait Pengadaan Barang/ Jasa	3 kali	233.400.500
4.05.4.05.03.20.04	Pengelolaan LPSE	Sekretariat Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	2 aplikasi	373.356.160	Pengelolaan LPSE	Sekretariat Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	2 aplikasi	373.356.160
4.05.4.05.03.21	Program Fasilitas Peningkatan Ekonomi Daerah		a. Jumlah pelaku ekonomi kreatif	100%	232.208.055.5	Program Fasilitas Peningkatan Ekonomi Daerah		b. Jumlah pelaku ekonomi kreatif	100%	232.208.055.5
			c. Kontribusi BUMD terhadap PAD					Kontribusi BUMD terhadap PAD		
4.05.4.05.03.21.01	Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan Sumber Daya Alam	Sekretariat Daerah	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan TSP	50 kali	45.323.798	Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan Sumber Daya Alam	Sekretariat Daerah	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan TSP	50 kali	45.323.798
			Koordinasi dengan SKPD terkait mengenai pengelolaan SDA	12 kali				Koordinasi dengan SKPD terkait mengenai pengelolaan SDA	12 kali	
4.05.4.05.03.21.02	Koordinasi Pelayanan Sarana Perekonomian;	Sekretariat Daerah	a. Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi kreatif, agribisnis dan pariwisata	24 kali	101.247.022.5	Koordinasi Pelayanan Sarana Perekonomian;	Sekretariat Daerah	b. Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi kreatif, agribisnis dan pariwisata	24 kali	101.247.022.5
			c. Jumlah koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait mengenai inflasi daerah, ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, pameran, agribisnis dan pariwisata	36 kali				d. Jumlah koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait mengenai inflasi daerah, ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, pameran, agribisnis dan pariwisata	36 kali	
4.05.4.05.03.21.03	Koordinasi dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Sekretariat Daerah	a. Jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD	33 kali	85.637.235	Koordinasi dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Sekretariat Daerah	b. Jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD	33 kali	85.637.235

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
c			c. Jumlah fasilitasi dan koordinasi kegiatan BUMD dan BLUD	80 kali				d. Jumlah fasilitasi dan koordinasi kegiatan BUMD dan BLUD	80 kali	
			e. Audit Apotek Trunojoyo Sampang	1 paket				f. Audit Apotek Trunojoyo Sampang	1 paket	
4.05.4.05.03.23	Program Koordinasi dan Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Persentase fasilitasi program bidang kesejahteraan rakyat	100%	4.445.645.955			Persentase fasilitasi program bidang kesejahteraan rakyat	100%	4.445.645.955
4.05.4.05.03.23.01	Fasilitasi Program Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan	Sekretariat Daerah	a. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	13 keg	3.793.634.710	Fasilitasi Program Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan	Sekretariat Daerah	b. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	13 keg	3.793.634.710
			c. Jumlah peringatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan	13 keg				d. Jumlah peringatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan	13 keg	
4.05.4.05.03.23.03	Fasilitasi Program Bidang Ketenagakerjaan dan Kependudukan	Sekretariat Daerah	Jumlah Koordinasi Bidang Ketenaga Kerjaan dan Kependudukan	21 kali	60.752.265	Fasilitasi Program Bidang Ketenagakerjaan dan Kependudukan	Sekretariat Daerah	Jumlah Koordinasi Bidang Ketenaga Kerjaan dan Kependudukan	21 kali	60.752.265
4.05.4.05.03.23.04	Fasilitasi Program Bidang Sosial dan Kesehatan	Sekretariat Daerah	a. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	5 keg	591.258.980	Fasilitasi Program Bidang Sosial dan Kesehatan	Sekretariat Daerah	b. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	5 keg	591.258.980
			c. Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan	5 keg				d. Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan	5 keg	
4.05.4.05.03.24	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai		Persentase peserta sosialisasi yang memahami ketentuan di bidang cukai	100%	196.754.795	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai		Persentase peserta sosialisasi yang memahami ketentuan di bidang cukai	100%	196.754.795
4.05.4.05.03.24.01	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi ketentuan di bidang cukai	300 org	196.754.795	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan	Sekretariat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi ketentuan di bidang cukai	300 org	196.754.795

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai					evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai				
4.05.4.05.03.41	Program Peningkatan Pelayanan Publik		Persentase dokumen IKM Kabupaten Sampang yang disusun	100%	246.608.180	Program Peningkatan Pelayanan Publik		Persentase dokumen IKM Kabupaten Sampang yang disusun	100%	246.608.180
4.05.4.05.03.41.01	Pembinaan pelayanan publik	Sekretariat Daerah	a. Persentase Laporan Standar Pelayanan Publik yang benar dan tepat waktu	100%	246.608.180	Pembinaan pelayanan publik	Sekretariat Daerah	b. Persentase Laporan Standar Pelayanan Publik yang benar dan tepat waktu	100%	246.608.180
			c. Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tercapai	70%				d. Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tercapai	70%	
			e. Jumlah PD yang di Monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik	64 unit kerja				f. Jumlah PD yang di Monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik	64 unit kerja	
4.05.4.05.03.42	Program Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase fasilitasi keprotokoleran dan komunikasi pimpinan	100%	680.729.000	Program Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase fasilitasi keprotokoleran dan komunikasi pimpinan	100%	680.729.000
.05.4.05.03.42.01	Fasilitasi keprotokoleran	Sekretariat Daerah	Keprotokoleran acara pimpinan	300 keg	362.569.000	Fasilitasi keprotokoleran	Sekretariat Daerah	Keprotokoleran acara pimpinan	300 keg	362.569.000
.05.4.05.03.42.02	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Sekretariat Daerah	jumlah kunjungan kerja pejabat negara yang difasilitasi	12 kunjungan	131.000.000	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Sekretariat Daerah	jumlah kunjungan kerja pejabat negara yang difasilitasi	12 kunjungan	131.000.000
.05.4.05.03.42.03	Fasilitasi dokumentasi pimpinan	Sekretariat Daerah	Dokumentasi acara pimpinan	200 keg	187.160.000	Fasilitasi dokumentasi pimpinan	Sekretariat Daerah	Dokumentasi acara pimpinan	200 keg	187.160.000
TOTAL					51,236,571,159	TOTAL				51,236,571,159

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2021 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2020.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Sampang Tahun 2021**

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Sekretariat Daerah pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang adalah nihil.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2021 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dengan Tema “**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**”.

Sekretariat Daerah sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Sampang Tahun 2021

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1.	Prioritas Pembangunan 1: Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Pembangunan 1 : Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata	Prioritas Pembangunan 1: Pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah guna mendukung proses transformasi ekonomi
2	Prioritas Pembangunan 2: Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Prioritas Pembangunan 2: Penguatan Konektivitas antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Prioritas Pembangunan 2: Peningkatan kualitas dan perluasan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
3	Prioritas Pembangunan 3: SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan ketahanan social masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan serta sarana dan prasarana dasar
4	Prioritas Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Pembangunan 4: Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat

5	Prioritas Pembangunan 5: Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Prioritas Pembangunan 1: Pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah guna mendukung proses transformasi ekonomi
6	Prioritas Pembangunan 6: Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas Pembangunan 6: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Prioritas Pembangunan 6: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
7	Prioritas Pembangunan 7: Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Pembangunan 7: Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat	Prioritas Pembangunan 4: Percepatan reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah pada Tahun 2021 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4
1	Tujuan 1 :		
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Nilai Sakip	84,01/A
	Sasaran 1 :		
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Nilai EKPPD	3,23
		2 Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum d. Bidang Perekonomian e. Bidang Barjas f. Bidang Pembangunan g. Bidang Organisasi h. Bidang Humas	100%

			i. Bidang Umum	
		3	Nilai Sakip	84,01/A
2	Tujuan 2 :			
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75
	Sasaran 2 :			
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75
3	Tujuan 3 :			
	Meningkatkan peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	1	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	100%
	Sasaran 3 :			
	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif		Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan	100%

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021

Dalam merumuskan program kegiatan Sekretariat Daerah mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Sekretariat Daerah mendukung pada pencapaian **misi 4** yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu Evaluasi kinerja BUMD, Pemberantasan barang kena cukai ilegal, Peningkatan kualitas pelayanan publik dan Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Selain pencapaian visi dan misi kepala daerah, tujuan dan sasaran daerah juga memperhatikan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang yang telah disusun.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang mendukung pada

pencapaian misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**.

Adapun program-program yang mendukung pada sasaran tersebut, yaitu:

- Program Fasilitasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Program Koordinasi dan Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Program Fasilitasi Administrasi Pembangunan Daerah
- Program Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan
- Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Program Peningkatan Pelayanan Publik
- Program Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah
- Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik
- Program Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan
- Program Peningkatan Pelayanan Publik

Program-program diatas kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021 sebagaimana terlampir sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 pada sistem aplikasi <https://e-planning.sampangkab.go.id/> yang ditampilkan pada Tabel T-C.33 sebagai berikut :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Perangkat Daerah : 4.05.03. -SEKRETARIAT DAERAH

Halaman 1 dari 13

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APBN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
4.05.	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA				23.491.488.525,00	-	-	23.491.488.525,00			32.544.652.928,00
4.05.4.05.0 3.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	-		100%	5.200.000.000,00	-	-	5.200.000.000,00		100%	7.138.586.311,00
4.05.4.05.0 3.01.01.	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	a. Jumlah surat yang terkirim	Sekretariat Daerah Kab. Sampang	10000 Surat	2.700.000.000,00	-	-	2.700.000.000,00	DAU	10000 Surat	3.751.658.293,00
		b. Jumlah jaminan atas barang milik daerah		3 Jenis	-	-	-	-		3 Jenis	-
		c. Cakupan pemenuhan kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi		12 Bulan	-	-	-	-		12 Bulan	-
		d. Jumlah Bahan bacaan yang disediakan		264 Eksemplar	-	-	-	-		264 Eksemplar	-
		e. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan		78 Unit	-	-	-	-		78 Unit	-
		f. Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan		13 Jenis	-	-	-	-		13 Jenis	-
		g. Jumlah Tenaga Honor Daerah		7 Orang	-	-	-	-		7 Orang	-
4.05.4.05.0 3.01.02.	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	a. Jumlah Alat Tulis Kantor	Sekretariat daerah Kab. Sampang	71 Jenis	1.300.000.000,00	-	-	1.300.000.000,00	DAU	71 Jenis	1.536.714.768,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APBN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
		b. Jumlah alat kebersihan yang disediakan		52 Jenis	-	-	-	-		52 Jenis	-
		c. Cakupan bahan logistic dan juru masak berikut pramusaji untuk Rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Sampang		12 Bulan	-	-	-	-		12 Bulan	-
		d. Jumlah barang cetakan		20 Jenis	-	-	-	-		20 Jenis	-
		e. Jumlah barang penggandaan		150000 Lembar	-	-	-	-		155000 Lembar	-
		f. Jumlah Komponen instalasi listrik		20 Jenis	-	-	-	-		20 Jenis	-
		g. Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang layak pakai		9 Jenis	-	-	-	-		9 Jenis	-
		h. Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga		3 Rumah Dinas	-	-	-	-		3 Rumah Dinas	-
4.05.4.05.0 3.01.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	a. Jumlah koordinasi luar daerah	Sekretariat Daerah Kab. Sampang	350 Kali	1.200.000.000,00	-	-	1.200.000.000,00	DAU	350 Kali	1.850.213.250,00
		b. Jumlah koordinasi dalam daerah		400 kali	-	-	-	-		400 kali	-
4.05.4.05.0 3.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-		100%	5.775.000.000,00	-	-	5.775.000.000,00		100%	10.369.138.435,00
4.05.4.05.0 3.02.01.	Pembangunan/rehab/ pemeliharaan gedung kantor	a. Jumlah rehabilitasi dan perbaikan gedung kantor	Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	1 Gedung Kantor	2.000.000.000,00	-	-	2.000.000.000,00	DAU	1 Gedung Kantor	919.266.082,00
		b. Jumlah gedung kantor yang dipelihara		1 Gedung Kantor	-	-	-	-		1 Gedung Kantor	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APBN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
4.05.4.05.0 3.02.02.	Pembangunan/rehab/ pemeliharaan rumah jabatan	a. Jumlah Rumah dinas yang di Rehabilitasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	3 Rumah Dinas	1.150.000.000,00	-	-	1.150.000.000,00	DAU	3 Rumah Dinas	1.336.196.337,00
		b. Jumlah Rumah dinas yang dipelihara		3 Rumah Dinas	-	-	-	-		3 Rumah Dinas	-
4.05.4.05.0 3.02.03.	Pengadaan/pemeliha raan kendaraan dinas opearsional	a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan	Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	0 Unit	1.900.000.000,00	-	-	1.900.000.000,00	DAU	0 Unit	7.258.181.963,00
		b. Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan		10 unit	-	-	-	-		0 unit	-
		c. Jumlah kendaraan dinas (R4) yang dipelihara		32 Unit	-	-	-	-		32 Unit	-
4.05.4.05.0 3.02.04.	Pengadaan/pemeliha raan peralatan dan perlengkapan kantor	a. Jumlah pengadaan peralatan kantor	Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	14 Unit	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00	DAU	14 Unit	719.886.746,00
		b. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara		36 Unit	-	-	-	-		36 Unit	-
		c. Jumlah pengadaan perlengkapan kantor		20 Unit	-	-	-	-		20 Unit	-
		d. Jumlah spanduk/umbul-umbul/bende ra yang disediakan		50 Unit	-	-	-	-		50 Unit	-
4.05.4.05.0 3.02.07.	Pengadaan pakaian dinas	a. Jumlah pembuatan Pakaian Dinas KDH/WKDH untuk Bupati dan Wakil Bupati, PDH untuk Sekda dan Ajudan Bupati dan Wakil Bupati	Sekretariat Daerah kabupaten sampang	12 Orang	125.000.000,00	-	-	125.000.000,00	DAU	12 Orang	135.607.307,00
		b. Jumlah pakaian kerja lapangan untuk Kasubag. RT beserta staf dan petugas kebersihan rumah dinas		35 Orang	-	-	-	-		35 Orang	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APBN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
4.05.4.05.0 3.15.01.	Fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah	a. Jumlah kunjungan kerja/inspeksi/Kepala Daerah/wakil kepala daerah	Sekretariat Daerah Kab. Sampang	35 Kali	2.171.657.250,00	-	-	2.171.657.250,00	DAU	35 Kali	2.280.240.113,00
		b. Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya		450 Kali	-	-	-	-		450 Kali	-
4.05.4.05.0 3.15.02.	Pemeliharaan jaminan kesehatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah	a. Jumlah keluarga Bupati dan Wakil Bupati	Sekretariat Daerah Kabupaten Sampafng	2 Keluarga	33.337.500,00	-	-	33.337.500,00	DAU	2 Keluarga	35.004.375,00
4.05.4.05.0 3.16.	Program Fasilitasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		100.00 %	900.000.000,00	-	-	900.000.000,00		100.00 %	1.080.000.000,00
4.05.4.05.0 3.16.01.	Fasilitasi administrsai pemerintahan	a. Jumlah Fasilitasi Rakor yang SAMPANG dilaksanakan	SAMPANG	48 Kali	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	Rapat Koordina si Unsur FORKOPI MDA : 24/tahun Rapat Koordina si Fasilitasi Pemerint ahan dengan OPD : 24/tahun	48 Kali	180.000.000,00
		b. Jumlah Rapat Koordinasi Unsur Forkopimda dan Jumlah Rapat Koordinasi Fasilitasi Pemerintahan dengan OPD		48 Kali	-	-	-	-		48 Kali	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APBN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
4.05.4.05.0 3.16.02.	Fasilitasi administrasi kewilayahan	a. Jumlah Batas Desa yang di Adminstrasikan	sampang	85 Paket	280.000.000,00	-	-	280.000.000,00	Pemasangan Patok Pilar Batas Desa	85 Paket	336.000.000,00
4.05.4.05.0 3.16.03.	Fasilitasi kerjasama dan otonomi daerah	a. Jumlah Pelaksanaan Kerjasama Daerah	sampang	24 Dokumen	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	Kerjasama Daerah	24 Dokumen	180.000.000,00
		b. Jumlah Kerjasama Daerah yang dilaksanakan		24 Dokumen	-	-	-	-		24 Dokumen	-
4.05.4.05.0 3.16.04.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	a. Jumlah Dokumen Penyusunan LPPD, ILPPD dan LKPJ	sampang	3 Dokumen	230.000.000,00	-	-	230.000.000,00	LPPD, ILPPD, LKPJ	3 Dokumen	276.000.000,00
		b. Jumlah Penyusunan Dokumen LPPD, ILPPD dan LKPJ Yang Berkualitas dan Tepat Waktu		3 Dokumen	-	-	-	-		3 Dokumen	-
4.05.4.05.0 3.16.05.	Fasilitasi pembinaan dan pengembangan Perangkat Daerah	a. Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pembinaan Administrasi	sampang	14 Kecamatan	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00	Pembinaan Administrasi Kecamatan	14 Kecamatan	108.000.000,00
4.05.4.05.0 3.17.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase fasilitasi terhadap Cagar Budaya		-	1.030.000.000,00	-	-	1.030.000.000,00		-	1.250.000.000,00
		Persentase penyelesaian kasus hukum perdata pemerintah daerah yang ditangani		100.00 %						100.00 %	
		Persentase Produk Hukum yang diundangkan		100.00 %						100.00 %	
4.05.4.05.0 3.17.01.	Penyusunan produk hukum	a. Jumlah Perda yang diundangkan	Bagian Hukum	10 Perda	420.000.000,00	-	-	420.000.000,00	APBD	10 Perda	480.000.000,00
		b. Jumlah Perbup yang diundangkan		50 Perbup	-	-	-	-		50 Perbup	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APBN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
		c. Jumlah Keputusan Bupati yang ditetapkan		500 Kepbup	-	-	-	-		500 Kepbup	-
		d. Jumlah Raperda		5 Raperda	-	-	-	-		5 Raperda	-
		e. Jumlah Naskah Akademik		5 Naskah Akademik	-	-	-	-		5 Naskah Akademik	-
4.05.4.05.0 3.17.02.	Fasilitasi bantuan hukum	a. Jumlah Permasalahan Hukum yang ditangani	Bagian Hukum	4 Kasus	370.000.000,00	-	-	370.000.000,00	APBD	4 Kasus	470.000.000,00
		b. Jumlah Kadarkum yang dibina		225 Keluarga	-	-	-	-		225 Keluarga	-
		c. Jumlah penyuluhan hokum terpadu		350 orang	-	-	-	-		350 orang	-
4.05.4.05.0 3.17.03.	Fasilitasi dokumentasi dan informasi	a. Jumlah Peserta Sosialisasi	Bagian Hukum	350 Orang	240.000.000,00	-	-	240.000.000,00	APBD	350 Orang	300.000.000,00
		b. Jumlah Produk Hukum yang dipublikasikan berupa : Buku Bulletin edisi juni dan desember , Buku Lembaran Daerah		360 Buku	-	-	-	-		360 Buku	-
4.05.4.05.0 3.18.	Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase target kinerja kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan formasi Jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan		100.00 %	1.040.000.000,00	-	-	1.040.000.000,00		100.00 %	1.215.000.000,00
4.05.4.05.0 3.18.01.	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	a. Persentase Pelaporan Kinerja Kabupaten Sampang Yang berkualitas dan tepat Waktu	kabupaten Sampang	100 %	320.000.000,00	-	-	320.000.000,00	DAU	100 %	350.000.000,00
		b. Persentase Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan Tepat Waktu		100 %	-	-	-	-		100 %	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APBN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
4.05.4.05.0 3.19.	Program Fasilitas Administrasi Pembangunan Daerah	Persentase fasilitas Kegiatan Administrasi Pembangunan Daerah		100.00 %	1.030.000.000,00	-	-	1.030.000.000,00		100.00 %	1.512.500.000,00
4.05.4.05.0 3.19.01.	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	a. Jumlah Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah yang tersusun	Kabupaten Sampang	1 Dokumen	345.000.000,00	-	-	345.000.000,00	DAU	1 Dokumen	412.500.000,00
		b. Jumlah Buku SSHB (Standart Satuan Harga Barang)		1 Dokumen	-	-	-	-		1 Dokumen	-
		c. Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan		10 Dokumen	-	-	-	-		10 Dokumen	-
		d. Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi		700 Peserta	-	-	-	-		700 Peserta	-
4.05.4.05.0 3.19.02.	Pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah	a. Jumlah Buku Pengendalian Program yang disusun	Kabupaten Sampang	1 Dokumen	270.000.000,00	-	-	270.000.000,00	DAU	1 Dokumen	440.000.000,00
		c. Jumlah Laporan Pengendalian		51 OPD	-	-	-	-		51 OPD	-
		d. Jumlah Peserta yang dibina		100 PNS	-	-	-	-		100 PNS	-
4.05.4.05.0 3.19.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan;	a. Jumlah Sistem Informasi Pelaporan Administrasi Pembangunan Daerah yang dikelola	Kabupaten Sampang	1 Aplikasi	415.000.000,00	-	-	415.000.000,00	DAU	1 Aplikasi	660.000.000,00
		b. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Konstruksi		1 Dokumen	-	-	-	-		1 Dokumen	-
		c. Jumlah Peresmian Kegiatan Konstruksi yang dilaksanakan		1 Kali	-	-	-	-		1 Kali	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APBN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
4.05.4.05.0 3.20.	Program Fasilitas Unit Layanan Pengadaan	Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi secara elektronik		100.00 %	1.100.000.000,00	-	-	1.100.000.000,00		100.00 %	1.406.190.000,00
4.05.4.05.0 3.20.01.	Pengelolaan administrasi pengadaan barang/jasa	a. Jumlah Dokumen Hasil Tender	Kabupaten Sampang	300 Dokumen	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00	DAU	300 Dokumen	672.014.400,00
4.05.4.05.0 3.20.02.	Pembinaan pengadaan barang/jasa	a. Jumlah sosialisasi/pelatihan/pendampingan terkait Pengadaan Barang/Jasa	Kabupaten Sampang dan Luar Kabupaten Sampang	3 kali	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	DAU	3 kali	282.414.600,00
4.05.4.05.0 3.20.04.	Pengelolaan LPSE	a. Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	Kabupaten Sampang	2 Aplikasi	400.000.000,00	-	-	400.000.000,00	DAU	2 Aplikasi	451.761.000,00
4.05.4.05.0 3.21.	Program Fasilitas Peningkatan Ekonomi Daerah	Jumlah pelaku ekonomi kreatif		53.00 pelaku	260.000.000,00	-	-	260.000.000,00		53.00 pelaku	400.000.000,00
		Kontribusi BUMD terhadap PAD		15.73 %						15.73 %	
4.05.4.05.0 3.21.01.	Koordinasi dan monitoring pengelolaan sumber daya alam;	a. Jumlah fasilitasi, koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan TSP	Kabupaten Sampang	60 kali	51.760.799,00	-	-	51.760.799,00	DAU	60 kali	79.611.631,00
		b. Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait mengenai pengelolaan SDA		15 kali	-	-	-	-		20 kali	-
4.05.4.05.0 3.21.02.	Koordinasi pelayanan sarana perekonomian;	a. Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi kreatif, agribisnis dan pariwisata	Kabupaten Sampang	27 kali	114.901.801,00	-	-	114.901.801,00	DAU	27 kali	176.748.773,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APBN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
4.05.4.05.0 3.24.	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase peserta sosialisasi yang memahami ketentuan di bidang cukai		100.00 %	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00		100.00 %	275.500.000,00
4.05.4.05.0 3.24.02.	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	a. Jumlah sosialisasi/penyampaian informasi ketentuan di bidang cukai	Kab. Sampang	7 Kali	224.500.000,00	-	-	224.500.000,00	DAU	7 Kali	250.000.000,00
4.05.4.05.0 3.24.03.	Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	a. Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan DBHCHT	Kab. Sampang	1 Laporan	25.500.000,00	-	-	25.500.000,00	DAU	1 Laporan	25.500.000,00
4.05.4.05.0 3.41.	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-		-	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00		-	280.000.000,00
4.05.4.05.0 3.41.01.	Pembinaan pelayanan publik	a. Persentase Laporan Standart Pelayanan Publik yang benar dan tepat waktu	Kabupaten sampang	100 %	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	DAU	100 %	280.000.000,00
		b. Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tercapai		80 %	-	-	-	-		90 %	-
		c. Jumlah PD yang di Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik		64 Unit Kerja	-	-	-	-		64 Unit Kerja	-
4.05.4.05.0 3.42.	Program Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitasi keprotokoleran dan komunikasi pimpinan		100.00 %	640.000.000,00	-	-	640.000.000,00		100.00 %	734.500.000,00
4.05.4.05.0 3.42.01.	Fasilitasi keprotokoleran	a. Keprotokoleran acara pimpinan	Sampang	300 kegiatan	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00	DAU	300 kegiatan	398.500.000,00
4.05.4.05.0 3.42.02.	Fasilitasi komunikasi pimpinan	a. jumlah kunjungan kerja pejabat negara yang difasilitasi	Sampang	12 kunjungan	130.000.000,00	-	-	130.000.000,00	DAU	12 kunjungan	136.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APBN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
4.05.4.05.0 3.42.03.	Fasilitasi dokumentasi pimpinan	a. dokumentasi acara pimpinan	Sampang	200 kegiatan	160.000.000,00	-	-	160.000.000,00	-	200 kegiatan	199.500.000,00
TOTAL					23.491.488.525,00	-	-	23.491.488.525,00			32.544.652.928,00

SAMPANG, 08 Oktober 2020

NIP.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021

Sekretariat Daerah mengampu urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Program-program Sekretariat Daerah pada Tahun 2021 mendukung prioritas pembangunan **“Prioritas 4. Percepatan Reformasi Birokrasi, Penyederhanaan Regulasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”** sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2021**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5
	Belanja Langsung (BL)			29.212.641.629
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH			29.212.641.629
	BAGIAN UMUM			
4.05.4.05.03.0 1.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100%	6.230.010.260
4.05.4.05.03.0 1.01.	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	a. Jumlah Surat Terkirim	873 Surat	3.402.864.665
		b. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi	12 Bulan	
		c. Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Memperoleh Jasa Perizinan	27 Unit	
		d. Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	4 Ob	
		e. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis	14 Ob	
		f. Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1095 exp	
		g. Jumlah pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman	866 ok	

4.05.4.05.03.0 1.02.	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	a. Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	74 jenis	1.393.845.595
		b. Jumlah alat kebersihan yang disediakan	90 jenis	
		c. Jumlah bahan logistik dan juru masak berikut pramusaji untuk rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Sampang	12 bulan	
		d. Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai dan layak pakai	9 jenis	
		e. Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga untuk rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	3 Rumah Dinas	
		f. Jumlah kebutuhan pergantian untuk komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	38 jenis	
		g. Jumlah surat-surat/ blanko/ formulir yang diperbanyak (cetak dan fotocopy/ penggandaan)	24 jenis	
4.05.4.05.03.0 1.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	a. Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yang diikuti untuk menyamakan persepsi antar daerah	1391 kali	1.433.300.000
		b. Jumlah koordinasi dengan SKPD di Kabupaten Sampang	403 kali	
4.05.4.05.03.0 2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	9.405.114.680
4.05.4.05.03.0 2.01.	Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor	a. Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan gedung kantor	1 gedung kantor	833.801.435
		b. Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 gedung kantor	
4.05.4.05.03.0 2.02.	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Rumah Jabatan	a. Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan untuk rumah jabatan dinas	3 Rumah Dinas	1.211.969.920
		b. Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan untuk Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang	3 Rumah Dinas	
4.05.4.05.03.0 2.03.	Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas opearsional	a. Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Bupati (5 unit); Wakil Bupati (2 unit); Sekretaris Daerah (2 unit); Asisten (3 unit); Staf Ahli (3 unit); Kepala Bagian (9 unit); Tangki Air (1 unit); Pick Up (2 unit); Pool (5 unit)	32 Unit	6.583.385.000
		b. Jumlah pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati	2 Unit	
		c. Jumlah pengadaan kendaraan dinas untuk Forkopimda	4 Unit	

4.05.4.05.03.0 2.04.	Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	a. Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	36 unit	652.958.500
		b. Jumlah pengadaan alat rumah tangga, computer dan meja/kursi kerja pejabat	44 unit	
4.05.4.05.03.0 2.07.	Pengadaan Pakaian Dinas	a. Jumlah pembuatan Pakaian Dinas KDH/WKDH untuk Bupati dan Wakil Bupati, PDH untuk Sekda dan Ajudan Bupati dan Wakil Bupati	50 orang	122.999.825
		b. Jumlah pakaian kerja lapangan untuk Kasubag. RT beserta staf dan petugas kebersihan rumah dinas	50 orang	
4.05.4.05.03.0 3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	410.500.000
4.05.4.05.03.0 3.01.	Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	Jumlah PNS yang wajib meningkatkan keterampilan teknis di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Sampang berikut kewajiban Bupati mengikuti Lemhanas	11 orang	410.500.000
4.05.4.05.03.0 4.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100%	45.000.000
4.05.4.05.03.0 4.01.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	a. Jumlah Laporan Kemajuan fisik /Non fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LkjiP	6 Dok	8.536.825
		a. Jumlah Laporan Akhir Tahun sebelumnya SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	6 Dok	
4.05.4.05.03.0 4.02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Laporan RKA dan DPA SKPD Tahun berikutnya	4 Dok	16.028.675
4.05.4.05.03.0 4.03.	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah promosi pelayanan perangkat daerah	2 paket	15.700.000
4.05.4.05.03.15	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan kedinasan KDH/WKDH yang difasilitasi	100%	2.099.995.000
4.05.4.05.03.15.01	Fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	a. Jumlah kunjungan kerja / inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	369 kali	2.068.245.000
		b. Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	409 kali	
4.05.4.05.03.15.02	Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Keluarga Bupati dan Wakil Bupati	4 keluarga	31.750.000
	BAGIAN PEMERINTAHAN			
4.05.4.05.03.16	Program Fasilitasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah	100%	999.550.000

4.05.4.05.03.16.01.	Fasilitasi administrasi pemerintahan	jumlah dialog/audiensi yang dilaksanakan	14 kali	170.000.000
4.05.4.05.03.16.02.	Fasilitasi administrasi kewilayahan	Jumlah dokumen rupabumi/toponomi	1 dok dan peta	320.000.000
4.05.4.05.03.16.03.	Fasilitasi kerjasama dan otonomi daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim otoda	24 dok	150.000.000
4.05.4.05.03.16.04.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	jumlah dokumen penyusunan lppd dab ilppd yang disusun	2 dok	229.550.000
4.05.4.05.03.16.05.	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan administrasi	14 kec	130.000.000
	BAGIAN HUKUM			
4.05.4.05.03.17.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	a. Persentase Produk Hukum yang diundangkan b. Persentase Penyelesaian Kasus Hukum Perdata Pemerintah Daerah yang ditangani	100% 100%	1.012.165.740
4.05.4.05.03.17.01.	Penyusunan Produk Hukum	a. Jumlah Perda yang diundangkan	7 perda	430.401.275
		b. Jumlah Perbup yang diundangkan	50 Perbup	
		c. Jumlah Raperda	5 Raperda	
		d. Jumlah Keputusan Bupati yang ditetapkan	500 SK	
		e. Jumlah Naskah Akademik	5 Naskah akademik	
4.05.4.05.03.17.02.	Fasilitasi Bantuan Hukum	a. Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum	350 orang	363.320.015
		b. Jumlah Permasalahan Hukum yang ditangani	4 Kasus	
		c. Jumlah Kadarkum yang dibina	225 Keluarga	
4.05.4.05.03.17.03	Fasilitasi Dokumentasi dan Informasi	Jumlah Produk Hukum yang dipublikasikan berupa buku Bulletin dan Buku Lembaran Daerah, Jumlah peserta sosialisasi	360 buku dan 350 org	218.444.450
	BAGIAN ORGANISASI			
4.05.4.05.03.18.	Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase target kinerja kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan formasi Jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan	100%	1.055.212.375
4.05.4.05.03.18.01	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	a. Persentase Pelaporan Kinerja Kabupaten Sampang yang berkualitas dan tepat waktu	100%	309.999.825
		b. Persentase Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	100%	
4.05.4.05.03.18.02	Penataan Kelembagaan serta Penyusunan Analisis dan Formasi Jabatan	a. Persentase Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan sesuai kebutuhan	100%	312.975.350
		b. Persentase Evaluasi Jabatan yang sesuai Permenpan	100%	

		c. Persentase Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan PNS sesuai SOTK baru	100%	
		d. Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	100%	
4.05.4.05.03.18.03	Peningkatan Ketatalaksanaan Pemerintah	a. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Kode Wilayah dengan baik dan benar	100%	142.254.030
		b. Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Tata Naskah Dinas dengan baik dan benar	100%	
		c. Persentase PNS yang telah memakai Pakaian Dinas dan Atribut dengan baik dan benar	100%	
4.05.4.05.03.18.04	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	a. Jumlah Peraturan Bupati tentang RMRB Kabupaten Sampang	1 Perbub	289.983.170
		b. Persentase OPD yang telah menyusun Rencana Aksi (Action Plan) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	
		c. Persentase OPD yang telah di evaluasi Reformasi Birokrasi	100 %	
		d. OPD yang mengikuti Kompetisi Budaya Kinerja Tk. Provinsi Jawa Timur	2 OPD	
		e. Jumlah Unit Kerja yang diusulkan WBK/WBBM menuju Zona Integritas	8 Unit Kerja	
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
4.05.4.05.03.19.	Program Fasilitasi Administrasi Pembangunan Daerah	Persentase fasilitasi Kegiatan Administrasi Pembangunan Daerah	100%	995.741.664
4.05.4.05.03.19.01	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah buku pedoman, HSPK dan SSHB yang disusun	3 dok	298.538.199
4.05.4.05.03.19.02	Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah peserta Sosialisasi	700 org	276908425
4.05.4.05.03.19.03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	a. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi yang disusun	1 dok	420.295.040
		b. Jumlah Kegiatan Konstruksi yang diresmikan secara simbolis	10 lokasi	
	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH			
4.05.4.05.03.20.	Program Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang difasilitasi secara elektronik	100%	1.162.140.425
4.05.4.05.03.20.01	Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen Hasil Tender	300 Dok	555.383.765
4.05.4.05.03.20.02	Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah sosialisasi/ pelatihan/pendampingan terkait Pengadaan Barang/Jasa	3 kali	233.400.500
4.05.4.05.03.20.04	Pengelolaan LPSE	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	2 aplikasi	373.356.160

	BAGIAN PEREKONOMIAN DN SUMBER DAYA ALAM			
4.05.4.05.03.21.	Program Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah	a. Jumlah pelaku ekonomi kreatif	100%	232.208.055.5
		b. Kontribusi BUMD terhadap PAD		
4.05.4.05.03.21.01	Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan Sumber Daya Alam	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan TSP	50 kali	45.323.798
		Koordinasi dengan SKPD terkait mengenai pengelolaan SDA	12 kali	
4.05.4.05.03.21.02	Koordinasi Pelayanan Sarana Perekonomian;	a. Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi kreatif, agribisnis dan pariwisata	24 kali	101.247.022.5
		b. Jumlah koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait mengenai inflasi daerah, ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, pameran, agribisnis dan pariwisata	36 kali	
4.05.4.05.03.21.03	Koordinasi dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	a. Jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD	33 kali	85.637.235
		b. Jumlah fasilitasi dan koordinasi kegiatan BUMD dan BLUD	80 kali	
		c. Audit Apotek Trunojoyo Sampang	1 paket	
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.05.4.05.03.23	Program Koordinasi dan Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi program bidang kesejahteraan rakyat	100%	4.445.645.955
4.05.4.05.03.23.01	Fasilitasi Program Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan	a. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	13 keg	3.793.634.710
		b. Jumlah peringatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan	13 keg	
4.05.4.05.03.23.03	Fasilitasi Program Bidang Ketenagakerjaan dan Kependudukan	Jumlah Koordinasi Bidang Ketenaga Kerjaan dan Kependudukan	21 kali	60.752.265
4.05.4.05.03.23.04	Fasilitasi Program Bidang Sosial dan Kesehatan	a. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	5 keg	591.258.980
		b. Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan	5 keg	
	BAGIAN PEREKONOMIAN DN SUMBER DAYA ALAM			
4.05.4.05.03.24.	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase peserta sosialisasi yang memahami ketentuan di bidang cukai	100%	196.754.795
4.05.4.05.03.24.01	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi ketentuan di bidang cukai	300 org	196.754.795

	evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai			
	BAGIAN ORGANISASI			
4.05.4.05.03.41	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase dokumen IKM Kabupaten Sampang yang disusun	100%	246.608.180
4.05.4.05.03.41.01	Pembinaan pelayanan publik	a. Persentase Laporan Standar Pelayanan Publik yang benar dan tepat waktu	100%	246.608.180
		b. Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tercapai	70%	
		c. Jumlah PD yang di Monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik	64 unit kerja	
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			
4.05.4.05.03.42	Program Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitasi keprotokoleran dan komunikasi pimpinan	100%	680.729.000
4.05.4.05.03.42.01	Fasilitasi keprotokoleran	Keprotokoleran acara pimpinan	300 keg	362.569.000
4.05.4.05.03.42.02	Fasilitasi komunikasi pimpinan	jumlah kunjungan kerja pejabat negara yang difasilitasi	12 kunjungan	131.000.000
4.05.4.05.03.42.03	Fasilitasi dokumentasi pimpinan	Dokumentasi acara pimpinan	200 keg	187.160.000
TOTAL				51.236.571.159

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah akan melaksanakan Urusan Unsur Fungsi Penunjang Lainnya dengan total anggaran **Rp 51.236.571.159,00** yang digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 15 program dan 43 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Sekretariat Daerah dan lingkup Kabupaten Sampang.

4.2 Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2021

Ada 4 Inovasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 diantaranya adalah:

1. So Religie

Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan ulang organisasi perangkat daerah (perampingan perangkat daerah), yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diharapkan membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah.

Tujuan :

1. Birokrasi lebih dinamis dan lincah

2. Percepatan sistem kerja
3. Mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja agar lebih optimal
4. Mewujudkan profesionalitas ASN
5. Mengefisiensi belanja birokrasi

Manfaat :

Mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta dapat mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi sehingga kinerja Pemerintah Daerah menjadi lebih efisien dan efektif.

2. Peningkatan Kinerja PDAM Trunojoyo Sampang dengan Pembentukan Dewan Pengawas

PDAM merupakan BUMD Kab Sampang yang memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Kab. Sampang. Oleh karena itu guna meningkatkan kinerja PDAM Trunojoyo Sampang, perlu dibentuk Dewan Pengawas PDAM

Tujuan dan Manfaat :

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja Perumda Trunojoyo Sampang yang akan berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat dibidang perairan.

3. Percepatan dan Ketepatan Realisasi Pelaksanaan

Kabupaten Sampang merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam daerah terdampak kegiatan migas yang dilakukan oleh KKKS Migas cluster Sampang. Sehingga KKKS Migas cluster Sampang wajib melaksanakan PPM di Kabupaten Sampang yang sasarannya adalah masyarakat di daerah terdampak migas. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sampang wajib untuk memastikan agar pelaksanaan PPM tersebut bisa bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Sampang. Maka perlu dipastikan jika pelaksanaan PPM tersebut tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan Pemkab Sampang serta terealisasi dengan tepat sasaran melalui :

1. Pembentukan Tim Pengembangan Masyarakat Kabupaten Masyarakat
2. Melaksanakan Jaring Aspirasi Masyarakat di tingkat desa dalam penentuan usulan kegiatan PPM yang akan dilaksanakan
3. Melakukan sinkronisasi usulan kegiatan hasil jasmag agar tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan yang telah didanai oleh Pemerintah Kabupaten Sampang

4. Melakukan monitoring hasil pelaksanaan PPM.

Tujuan dan Manfaat :

Mensinergikan pelaksanaan PPM Migas oleh KKKS Migas Cluster Sampang dengan Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sampang

4. Pengendalian Inflasi daerah

Inflasi adalah meningkatnya harga barang dan jasa. Secara umum, dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan terjadi terus menerus. Pemerintah Kabupaten Sampang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga inflasi yang rendah dan stabil, karena dengan inflasi yang rendah dan stabil akan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sehingga daya beli masyarakatpun meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat ikut meningkat

Tujuan dan Manfaat :

Menjaga agar inflasi rendah, stabil dan terkendali

BAB V PENUTUP

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sampang yang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yaitu **“Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat melalui penguatan kontribusi sektor unggulan, kesehatan, dan infrastruktur menuju Sampang Hebat Bermartabat”**.

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan teknis yang memuat rencana program dan kegiatan dalam urusan pemerintahan yang bersumber pada APBD Tahun Anggaran 2021 dan hasil evaluasi atas Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang tahun lalu.



Dengan adanya Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan arah kebijakan program dan kegiatan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang pada Sekretariat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021;

3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.


BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI